



Drainase Tidak Sinkron dengan Dinamika Kota

JOGJA—Curah hujan yang tinggi dan saluran air hujan (SAH) yang belum disesuaikan dengan perkembangan memicu munculnya genangan dan banjir di sejumlah titik di DIY.

Luqas Subarkah, Catur Dwi Janati, & Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

Saat hujan deras pada Minggu (25/2) lalu, air menggenangi di sejumlah titik di Kota Jogja dan sekitarnya. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Agus Tri Haryono, menuturkan genangan di Kota Jogja disebabkan curah hujan tinggi dan masih banyaknya SAH

lama yang belum disesuaikan dengan perkembangan lahan di Kota Jogja.

"Perkembangan lahan di Kota Jogja sangat masif, sehingga perlu memperhitungkan skala kawasan. Kedua, sedimentasi drainase sehingga air tidak lancar."

▶ Kota Jogja menerapkan *low impact development* atau drainase lestari, dengan ditunjang infrastruktur pendukung.

▶ Debit air yang tinggi membuat drainase tak mampu lagi menampung aliran air yang masuk.

▶ Halaman 10

Drainase Tidak...

Ini perlu pembersihan karena pelumpuran, mungkin secara periodik berapa bulan sekali. Ketiga, kondisi topografi daerah yang ada pada cekungan, sehingga kesulitan mengalirkan limpasan ke sungai," ujarnya, Senin (26/2).

Kota Jogja menerapkan *low impact development* atau drainase lestari, dengan ditunjang infrastruktur pendukung seperti embung, ruang terbuka hijau, dan sumur resapan.

"Jalur drainase setiap 10 meter ada SPAH [sistem pemanfaatan air hujan]. Diameter 80 sentimeter, menggunakan bis beton kedalaman 2-4 meter," katanya.

Untuk menjaga fungsi drainase, DPUPKP berkoordinasi dengan UPT Limbah dan Bidang Permukiman agar jangan sampai air limbah dimasukkan ke drainase.

"Penerbitan dilakukan Satpol PP. Seperti kemarin di kawasan Tugu, saluran diisi dengan yang bukan semestinya," ungkapnya.

Di samping itu, pemeliharaan rutin dan insidental juga terus dilakukan untuk mempertahankan keandalan drainase.

"Layanan drainase, pemeliharaan, pelumpuran, perbaikan rutin, rehabilitasi SPAH dan SAH, insidental kita lakukan perbaikan," kata dia.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja, Nur Hidayat menjelaskan banjir terjadi merata di mana-mana dengan ketinggian air yang juga merata. "Barat hujan, utara juga hujan. Jadi debit airnya hujan di kota merata, intensitas tinggi dan lama," katanya.

Hujan deras dengan waktu cukup lama dan terjadi di daerah sekitar Kota Jogja seperti Sleman, turut menambah debit air yang masuk ke Kota Jogja sehingga memicu genangan. "Karena saluran tidak bisa tersalurkan dengan cukup. Jadi naik ke atas," katanya.

Padahal, menurutnya saluran drainase Kota Jogja masih berfungsi bagus, tidak ada penyumbatan atau permasalahan signifikan lainnya. "Karena sekarang tidak ada sampah liar menumpuk seperti dulu. Karena memang daerah utara

itu terlalu banyak air yang ke selatan, jadi, memang curah hujan debit besar," ungkapnya.

Debit Air

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Sleman. Hujan deras dengan durasi yang cukup lama akhir pekan lalu menimbulkan genangan yang cukup parah di jalan area simpang empat UPN. Debit air yang tinggi membuat drainase tak mampu lagi menampung aliran air yang masuk.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, menjelaskan genangan air bisa disebabkan sejumlah faktor. Meski demikian, faktor alam menjadi aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam terbentuknya genangan.

"Curah hujan tinggi yang pertama, kedua saluran airnya kurang untuk wadah. Kalau sumbatan kami belum mengecek, karena sumbatan harus dicek betul, benar enggak ada sumbatan," ujarnya.

Meskipun ada drainase, apabila hujan terjadi dalam durasi yang lama, debit air yang masuk akan lebih besar dari kapasitas drainase. Dengan curah hujan yang tinggi sementara penampungannya tidak cukup mewadahi, luapan tidak mampu dihindarkan. "Karena curah hujan tinggi, wadahnya kurang, air meluap ke jalan," katanya.

Berdasarkan peta hujan, Bambang mengungkapkan hujan paling deras di Sleman akhir pekan lalu terjadi di kawasan Maguwoharjo. Di area puncak Gunung Merapi hujan juga cukup deras. Namun belum diketahui apakah hujan yang merata hampir di seluruh wilayah juga berpengaruh pada penuhnya saluran air yang ada.

Jalan jenis aspal jelas membuat aliran air tidak ada yang terserap. Air hanya akan mengalir menuju area yang lebih rendah. "Kalau di aspal ya bubat. Semua airnya lari *doang*," ungkapnya.

Lebih-lebih kawasan Condongcatur dan jalan depan UPN menjadi kawasan langganan genangan air.

Sementara area Janti dan Amplas yang menjadi langganan genangan sebelumnya, relatif

tidak ada genangan yang tinggi saat terjadi hujan akhir pekan lalu. Hal itu karena perbaikan konstruksi yang dilakukan di area tersebut.

Krisis EWS

Sementara itu, Pemkab Bantul telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi akhir Februari 2024. Meski begitu, hingga saat ini Bantul masih kekurangan *early warning system* (EWS) banjir. Teknisi EWS Tsunami dan Komunikasi BPBD Bantul, Ruwadi Bege, menyampaikan saat ini di Bantul hanya ada enam unit EWS banjir dari kebutuhan sekitar 10-15 unit EWS banjir. Dari jumlah EWS banjir yang ada, dua unit di antaranya rusak.

Ia menyampaikan dua EWS yang rusak tersebut berada di Jembatan Kiringan, Canden, Jetis dan Jembatan Kedungjati, Selopamiro, Imogiri. Di kedua lokasi tersebut, sensor EWS banjir rusak dan sinyal GSM-nya rusak, sehingga saat debit air meningkat, EWS banjir tersebut tidak dapat mengirimkan sinyal peringatan dini.

Kerusakan tersebut menurutnya telah terjadi sejak sekitar tiga bulan lalu. "Kami sudah mengusulkan ke atasan untuk pergantian alat [sensor EWS banjir], Sensornya tetap diganti, tidak bisa diperbaiki," katanya, Senin.

Ia menyampaikan EWS tersebut telah ada sejak lima tahun lalu dan baru kali ini mengalami kerusakan.

Manajer Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Bantul, Aka Luk Luk Firmansyah, mengaku masih menunggu arahan terkait dengan perbaikan dua EWS banjir tersebut. "Perbaikan [EWS banjir] menunggu anggaran dan arahan pimpinan untuk diperbaiki," katanya.

Dia menyampaikan jumlah EWS banjir di Bantul belum mencukupi kebutuhan.

Menurutnya, dibutuhkan sekitar 10-15 unit EWS banjir di Bantul. "Jumlah EWS banjir yang ada] Ternyata kurang. Kalau dinyatakan cukup itu kurang, kalau berbicara *early warning* sebelum kejadian idealnya sudah ada peringatannya," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005